



Disdukcapil Akui Temuan BPK soal Kinerja

YOGYA, TRIBUN - Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, membenarkan ada permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 Di antaranya, BPK menyatakan pemerintah kota

Yogyakarta belum sepenuhnya menetapkan regulasi, kebijakan, dan pedoman yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga dinilai belum optimal mendorong penduduk dan berkoordinasi

dengan instansi lain untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga dianggap belum berupaya optimal dalam menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan dengan kualitas

data yang akurat mutakhir dan lengkap.

Menanggapi temuan BPK ini Kepala Disdukcapil Sisruwadi membenarkannya dan sudah melakukan perbaikan agar pelayanan bisa maksimal.

● ke halaman 19

Disdukcapil Akui Temuan BPK soal

● Sambungan Hal 13

"Sebenarnya dari temuan tersebut tak ada hal yang krusial. Hanya saja, BPK pengen tahu aturan yang selama dijadikan acuan itu efektif atau tidak," ujar Sisruwadi.

Menurut Sisruwadi, perbaikan yang sudah dilakukan di antaranya adalah BAP soal perpindahan penduduk atau status penduduk, misalnya, statusnya sudah meninggal dunia atau pindah penduduk harus detail.

Selain itu, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) agar pen-

catatan perubahan status perkawinan bisa segera dimutakhirkan.

"Untuk kerjasama dengan Kemenag sudah kita lakukan. Untuk KUA sementara baru Danurejan dan Gondomanan. Kemarin kita sudah kumpulkan semua KUA, sehingga ke depan kerjasama bisa segera efektif," ujar Sisruwadi. (yud)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005